

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Kemdikbud.
- Darmawan, H.C.B (ed). 2005. Jihad Melawan Korupsi. Jakarta. Kompas
- Erdianto Effendi. 2011. Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Ermansjah Djaja. 2010. Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sinar Grafika. Jakarta.
- Evi Hartati. 2007. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ernie dan Safulla. 2005. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta. Grasindo.
- Hamzah Halim & Putera, K, R, S. 2013, Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. Jakarta: Kencana.
- Hani Handoko. T. Manajemen. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2011
- HR, Ridwan, 2016, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta, RajaGrafindo Prasada)
- Husnaini. Manajemen. 2001. Jakarta. Bumi Aksara.
- Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) Mitra Buana Media.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan. KPK. Jakarta.
- Maringan Masri Simbolon. 2004. Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Melayu S.P Hasibuan. 2001. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Jakarta. Pt. Bumi Aksara.
- Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- M. Manullang. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- M. Manullang. Dasar-dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005.

- Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- Sondang P. Siagian. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008
- Sondang P. Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara 2017
- Soedijono Dirdjosisworo. 2010. *Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabet. Bandung.

Jurnal

- Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta. Rajawali Pers, 2016.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 2021.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Laporan Tahunan Pengawasan Internal*. Jakarta: BPKP. 2023
- Beridiansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*, Jurnal Integritas Volume 3 Nomor 2, Desember 2017
- . BPKP, *Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP*, 2020.
- Dwi Alfianto, *Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa*, Jurnal Ilmiah Universitas Trisakti.
- Fajlurrahman Jurdi. Rizqa Ananda Hanapi. dan Taufik Hidayat. *Menjaga Martabat Hakim Konstitusi*. Litera: Yogyakarta, 2020.
- Fahrurrozi & Nugroho R. "Efektivitas Pengawasan Internal Pemerintah Daerah di Indonesia". *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. 2022.
- Fraud Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Kulonprogo), Universitas Gadjadara, Yogyakarta
- Indrohato. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1994.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Reformasi Pengawasan Internal: Mendorong Sinergi APIP dan APH dalam Pencegahan Korupsi*. Jakarta: ICW. 2021

- Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2023.
- Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyo. Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya. *jurnal demokrasi* Vol. IX No. 1 .2010
- Jerry Indrawan. dll. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformatif* Vol.6 No 2 Tahun 2020
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021–2023. Jakarta: KemenPAN-RB. 2021.
- Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jakarta: Sekretariat RB. 2022
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kajian Risiko Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Dampak terhadap Pelayanan Publik dan Keselamatan Masyarakat. Jakarta: KPK RI. 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Identifikasi Titik Rawan dan Strategi Pencegahan Korupsi. Jakarta: KPK RI. 2021.
- Lamijan & Tohari. Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)*, vol. 3. no. 2. 2022
- Legawa. 2005. Analisis Peranan Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. 2010.
- Yosa. Pengawasan Sebagai Sarana Penegakan Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Depdagri*. 2010.
- Legawa, 2005, Analisis Peranan Inspektorat Daerah Dalam Pencegahan
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Risiko Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia. Jakarta: LKPP. 2022.
- Pasaribu, Pramella Yunidar dan Briando, Bobby, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, No. 2 (2019)
- R.Didi Djadjuli. *Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai*. Jurnal Unigal. Universitas Galuh. 2018.
- Richo Andi Wibowo, Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa, *Jurnal KPK* Volume 1 Nomor 1, November 2015

- Rizki Zakariya. 2021. Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 di Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol. II. No. 2.
- Rusadi Kantaprawira. *Hukum dan Kekuasaan*. Makalah. Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta. 1998.
- Sofyan Sari Harahap. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. 2001.
- Suparman, Eko dan Wibowo, Rachmat. Faktor Penghambat Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik: Sebuah Kajian Multi Dimensi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. Vol. 11. No. 1. 2023.
- Syamsudin, Harun Al Rasyid. *Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019
- Tjip Ismail, "Urgensi Independensi APIP dalam Pencegahan Korupsi di Daerah," *Jurnal Pengawasan dan Akuntabilitas*, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 119.
- Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 3 November 2018

Skripsi dan Artikel

- Badzlina Daroyani Novitaningrum, 2014, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement*, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 2 No. 1 (Januari 2014).
- Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni. Bandung. 2004.
- Ni'matul Huda. *Et.al. Laporan Penelitian Rekonstruksi Kedudukan dan Kewenangan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai Upaya Memperkuat Integritas Hakim Konstitusi*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Jakarta. 2018.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 221.

PerUndang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jenderal.

Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Keputusan Walikota Makassar Nomor:01/188.4.45/Tahun2024 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024.

Peraturan Kepala BPKP No. PER-1325/K/LB/2015 tentang Tata Cara Koordinasi APIP dengan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Nota Kesepahaman Nomor: NK/01/2021 s.d. NK/04/2021 tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi, antara BPKP, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sumber Internet

<https://nasional.tempo.co/read/news/2014/12/01/063625599/kpk-geledah-kantor-pdammakassar>. Berita online

<https://fahum.umsu.ac.id/info/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya>. Berita online

[https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi#:~:text=Korupsi%20Pengadaan%20Barang%20dan%20Jasa&text=Data%20Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW,mencapai%20Rp%205%2C3%20triliun](https://antikorupsi.org/id/pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah-lahan-basah-korupsi#:~:text=Korupsi%20Pengadaan%20Barang%20dan%20Jasa&text=Data%20Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW,mencapai%20Rp%205%2C3%20triliun). Berita online

<https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7880362/bendahara-kormi-makassar-jadi-tersangka-korupsi-dana-hibah-rp-1-miliar>. Berita online